

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka pemilihan strategi kebijakan pembangunan yang paling tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Analisis SWOT digunakan untuk menjangring persepsi dan penilaian ahli (*expert*) terhadap faktor internal dan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, sehingga pada akhirnya didapatkan faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman. Dari penilaian bobot IFAS (*Internal Factor Analysis System*) dan EFAS (*External Factor Analysis System*), didapatkan beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan dalam upaya pembangunan daerah Kabupaten Klaten.

Setelah didapatkan beberapa alternatif strategi, maka perlu dilakukan pemilihan prioritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Penentuan prioritas ini perlu dilakukan karena untuk melakukan seluruh strategi yang telah diperoleh melalui analisis SWOT akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan tidak semuanya bisa diakomodir oleh pihak pemerintah daerah. Untuk melakukan pemilihan prioritas strategi, maka digunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

5.1. Hasil dan Analisis SWOT

Analisis SWOT dalam rangka pemilihan alternatif kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten dilakukan dengan tahapan berikut:

5.1.1. Perumusan Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Berdasarkan dokumen-dokumen, kajian literatur, berita-berita yang dimuat di media lokal, survey pendahuluan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, serta gambaran umum yang telah diungkapkan dalam Bab 3, maka diperoleh elemen faktor-faktor internal dan eksternal seperti yang disajikan pada tabel 5.1 dan tabel 5.2

Tabel 5.1 Perumusan Identifikasi Faktor Internal

<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis Kabupaten Klaten 2. Kondisi topografi Kabupaten Klaten yang bervariasi (dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda-beda); 3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Klaten; 4. Ketersediaan infrastruktur dasar; 5. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian; 6. Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten; 7. Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro; 8. Kapasitas dan kinerja kelembagaan di Kabupaten Klaten; 9. Potensi Sumber Daya Alam; 10. Tingkat partisipasi masyarakat; 11. Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah; 12. Potensi pariwisata; 13. Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah; 14. Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor); 15. Penentuan skala prioritas pembangunan; 16. Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten; 17. Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Klaten

Tabel 5.2 Perumusan Identifikasi Faktor Eksternal

<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 2. Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009;

3. Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
4. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia;
5. Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China dan ASEAN lainnya (ACFTA);
6. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional;
7. Kondisi sosial politik di tingkat nasional;
8. Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten;
9. Berbagai program pemerintah pusat;
10. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer;
11. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat;
12. Kemajuan teknologi;
13. Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah;
14. Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Klaten;
15. Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten.

Berdasarkan penilaian responden, maka faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal tersebut dapat dikategorikan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, seperti yang tercantum pada lampiran 3, yang secara ringkas dapat dijelaskan pada tabel 5.3 dan tabel 5.4.

Tabel 5.3 Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Internal

	Faktor Internal	Bobot	Kriteria
1	Posisi geografis	7,75	S
2	Kondisi topografi	6,70	W
3	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia	7,55	S
4	Ketersediaan infrastruktur dasar	6,95	S
5	Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian	7,90	S
6	Sarana dan prasarana perekonomian	7,00	S

(Sambungan)

	Faktor Internal	Bobot	Kriteria
7	Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro	7,35	S
8	Kapasitas dan kinerja kelembagaan	6,40	W
9	Potensi Sumber Daya Alam	7,00	S
10	Tingkat partisipasi masyarakat	6,30	W
11	Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan	6,55	W
12	Potensi pariwisata	6,90	S
13	Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah	6,60	W
14	Upaya mensosialisasikan potensi daerah	6,20	W
15	Penentuan skala prioritas pembangunan	6,40	W
16	Sistem birokrasi	6,05	W
17	Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD	6,00	W
	Rata-rata	6,80	

Sumber: penilaian responden atas kuisioner SWOT

Tabel 5.4 Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Eksternal

	Faktor Eksternal	Bobot	Kriteria
1	Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan keseimbangan keuangan pusat dan daerah	6,60	O
2	Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009	6,70	O
3	Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	6,95	O
4	Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia	6,05	T
5	Ditandatangani kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China	5,40	T
6	Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional	6,60	O
7	Kondisi sosial politik di tingkat nasional	6,30	T
8	Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten	6,45	O
9	Berbagai program pemerintah pusat	6,85	O
10	Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer	6,75	O

(Sambungan)

	Faktor Eksternal	Bobot	Kriteria
11	Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat	6,25	T
12	Kemajuan tehnologi	6,65	O
13	Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah	6,40	T
14	Investasi swasta	6,15	T
15	Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten	6,45	O
	Rata-rata	6,44	

Sumber: penilaian responden atas kuisisioner SWOT

Dari tabel 5.3 dan tabel 5.4 dapat terlihat bahwa hasil pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal relatif rapat, dalam artian selisih antara faktor-faktor yang dibobotkan sangat kecil dan hampir semua berkisar diantara bobot 6 dan 7. Hal ini mengimplikasikan bahwa apabila dilakukan penilaian ulang pada responden, bisa jadi didapatkan hasil yang berbeda.

5.1.1.1. Faktor-faktor Internal

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai *benchmark* atau rata-rata dari seluruh faktor internal adalah sebesar 6,80. Faktor-faktor internal tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal yang nilai rata-ratanya diatas nilai *benchmark*, dikelompokkan sebagai kekuatan (*strength*), dan faktor internal yang nilai rata-ratanya dibawah nilai *benchmark*, yang dikelompokkan sebagai kelemahan (*weakness*).

Tabel 5.5 Ringkasan Pembobotan Faktor-Faktor Internal

	Strength	Rata2
1	Posisi geografis Kabupaten Klaten dalam menunjang terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa	7,75
3	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Klaten	7,55
4	Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, irigasi, dan infrastruktur jalan	6,95
5	Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian	7,9
6	Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten	7
7	Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro	7,35
9	Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten sebagai sumber PAD dan pembangunan	7
12	Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata	6,9
	Weakness	Rata2
2	Kondisi topografi Kabupaten Klaten yang bervariasi (dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda-beda)	6,7
8	Kapasitas dan kinerja kelembagaan di Kabupaten Klaten	6,4
10	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	6,3
11	Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah	6,55
13	Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah	6,6
15	Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor)	6,2
16	Penentuan skala prioritas pembangunan	6,4
17	Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten dalam upaya penciptaan investasi di Kabupaten Klaten	6,05
18	Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Klaten	6

Sumber: Hasil penilaian responden atas kuisisioner SWOT

a. Faktor Kekuatan (strength)

Berdasarkan rekapitulasi dari penilaian seluruh responden, faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. *Posisi geografis Kabupaten Klaten.* Posisi geografis Kabupaten Klaten mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,75. Kabupaten Klaten terletak diantara daerah-daerah yang sudah maju dan memiliki fasilitas-fasilitas yang telah berstandar internasional. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Klaten, karena bagaimanapun pasti terdapat efek limpahan dari fasilitas tersebut, seperti misalnya bandar udara, maupun fasilitas jalan yang dapat mempermudah aktivitas perekonomian di Kabupaten Klaten. Posisi yang sangat strategis tersebut, menunjang terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa dalam rangka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten.
2. *Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.* Faktor kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Kabupaten Klaten mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,55. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang cukup banyak tentu saja dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Dari sisi kualitas, sumber daya manusia di Kabupaten Klaten juga sangat mendukung pembangunan, karena pembangunan manusia di Kabupaten Klaten bisa dikatakan berhasil, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia-nya yang terus meningkat dan IPM Kabupaten Klaten menduduki peringkat kedua diantara daerah-daerah se-eks Karesidenan Surakarta. Dengan kondisi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten memiliki modal dasar yang cukup baik, yaitu sumber daya manusia yang melimpah dan berkualitas.
3. *Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, irigasi, dan infrastruktur jalan,* faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,95. Sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial lainnya, sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Infrastruktur dasar

di Kabupaten Klaten, secara umum telah tersedia secara merata dan mencukupi di seluruh wilayah, walaupun dengan kualitas yang masih beragam.

4. *Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,9. Kabupaten Klaten selama bertahun-tahun dikenal sebagai lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah. Meskipun secara umum sektor pertanian bukan lagi menjadi sektor utama bagi perekonomian Kabupaten Klaten, namun saat ini pemerintah Kabupaten Klaten sedang menggalakkan peningkatan pelaksanaan program pertanian terpadu melalui revitalisasi pertanian.
5. *Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7. Pasar dan kawasan ekonomi lainnya di lingkungan Kabupaten Klaten telah cukup tersedia secara merata. Pemerintah daerah Kabupaten Klaten banyak membangun pasar untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian masyarakat setempat.
6. *Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,35. Kabupaten terkenal dengan beberapa industri yang mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Industri tersebut antara lain, industri mebel, cor logam, keramik/gerabah, dan konveksi. Banyaknya industri dan beberapa produk *home made* yang dihasilkan oleh Kabupaten Klaten menunjukkan tingginya keuletan dan jiwa kewirausahaan masyarakat Kabupaten Klaten. Bahkan, produk kain khas Kabupaten Klaten yang sempat tidak diproduksi lagi dalam beberapa tahun, saat ini mulai kembali diproduksi. Selain terkenal dengan berbagai industrinya, Kabupaten Klaten juga mulai memperkuat sektor perekonomian melalui koperasi. Saat ini, jumlah koperasi dan anggota koperasi berkembang dengan sangat pesat, yang tentu saja menjadi kekuatan tersendiri bagi perekonomian Kabupaten Klaten secara umum.

7. *Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7. Secara topografi, Kabupaten Klaten memang memiliki kendala dalam pembangunan fisik, namun sebenarnya, kondisi topografi Kabupaten Klaten juga memberikan berbagai keuntungan, diantaranya memungkinkan berbagai jenis tanaman pangan untuk tumbuh di wilayah Kabupaten Klaten, dan memberikan beberapa sumber air yang sangat berguna bagi Kabupaten Klaten, maupun daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Klaten saat ini sedang menggalakkan peningkatan kualitas SDA guna mendukung kualitas pembangunan daerah.
8. *Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,9. Kabupaten Klaten memiliki berbagai jenis obyek wisata, baik yang sifatnya alami maupun buatan manusia. Dari seluruh obyek wisata tersebut, masih banyak obyek pariwisata yang belum secara optimal dikembangkan potensinya, misalnya, Desa Keramik Melikan, Bayat, yang sangat potensial sebagai desa wisata. Dengan potensi sebesar itu, Kabupaten Klaten memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Klaten.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan rekapitulasi dari penilaian seluruh responden, faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. *Kondisi topografi Kabupaten Klaten*. Faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,7. Kondisi topografi Kabupaten Klaten yang bervariasi, (dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda-beda), tentu saja menjadi salah satu kendala pembangunan secara fisik. Untuk melakukan pembangunan fisik, seperti misalnya pembangunan fasilitas jalan, di daerah dataran tinggi tentu saja tidak semudah pembangunan fisik di dataran rendah yang secara topografi daerahnya lebih rata. Sehingga pada

akhirnya akan menjadi kendala pada sistem transportasi dan komunikasi di Kabupaten Klaten.

2. *Kapasitas dan kinerja kelembagaan*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,4. Secara organisasi, Kabupaten Klaten terdiri dari 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang terbagi menjadi 2 SKPD berbentuk sekretariat, 4 SKPD berbentuk badan, 7 SKPD berbentuk dinas, 13 SKPD berbentuk kantor, dan 26 kecamatan. Beberapa responden menyatakan bahwa kinerja lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Klaten belum cukup baik untuk menunjang pembangunan daerah. Sebagai salah satu bukti adalah masih rendahnya pendapatan daerah, yang oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2008, salah satunya disebabkan karena kurang optimalnya penanganan pemungutan pajak/retribusi. Dari sini tampak bahwa memang kinerja beberapa lembaga atau dinas-dinas daerah Kabupaten Klaten belum bekerja secara optimal.
3. *Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,3. Komunikasi dan koordinasi antara para pelaku ekonomi merupakan hal yang juga sangat penting, sehingga pemerintah tahun apa saja yang menjadi kebutuhan dari para pelaku ekonomi, termasuk diantaranya masyarakat dan pengusaha. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sehingga pemerintah dapat membuat prioritas pembangunan secara tepat. Namun, sampai saat ini, partisipasi masyarakat ini masih dianggap kurang untuk dapat menangkap keinginan dan kebutuhan para pelaku ekonomi. Selain karena minimnya biaya pembangunan, kurangnya partisipasi masyarakat ini juga mengakibatkan tidak terakomodirnya keinginan masyarakat.
4. *Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,55. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih untuk bisa semakin menggali potensi daerah yang dimiliki.

Namun, kewenangan ini ternyata belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, hal ini terbukti dengan belum optimalnya pencapaian PAD untuk pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, sehingga akibatnya sampai saat ini Kabupaten Klaten masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat.

5. *Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,6. Kondisi topografi Kabupaten Klaten yang cenderung variatif menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah masih belum merata dan masih banyak penduduk yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial dan berada di bawah garis kemiskinan.
6. *Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor)*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,2. Kabupaten Klaten memiliki potensi daerah yang cukup beragam, dari potensi pariwisata sampai potensi sumber daya alam, yang dapat dijadikan faktor-faktor produksi, seperti misalnya potensi sumber air, yang saat ini telah dikerjasamakan dengan PT. Tirta Investama dan PDAM Kota Surakarta. Namun, oleh para responden (yang dianggap ahli) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten masih kurang melakukan upaya-upaya sosialisasi dan promosi potensi daerah, sehingga belum banyak potensi yang terekspos, dan belum banyak investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Klaten.
7. *Penentuan skala prioritas pembangunan*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,4. Penentuan skala prioritas adalah hal yang paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah, dan ada saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Klaten sedang berusaha untuk mempertajam prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh para ahli, penentuan skala prioritas pembangunan belum semuanya telah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan belum banyaknya perbaikan fasilitas dan sarana umum yang sebelumnya telah mengalami

kerusakan, seperti sarana jalan di daerah penambangan pasir yang kerusakannya semakin parah.

8. *Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten*; faktor ini mendapat nilai rata-rata sebesar 6,05. Birokrasi berkaitan sangat erat dengan investasi, sistem birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten oleh beberapa pihak dianggap rumit dan berbelit-belit, sehingga para investor harus berpikir dua kali sebelum bersedia menanamkan investasi ke Kabupaten Klaten. Padahal, sistem birokrasi yang sederhana dan transparan dapat mendorong penanaman modal di lingkungan Kabupaten Klaten.
9. *Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD*; faktor PAD dan struktur APBD Kabupaten Klaten mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, secara keuangan, masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat dijadikan sumber pembiayaan tunggal untuk pembangunan daerah, dan hanya menyumbang sekitar 4,04% terhadap total penerimaan. Demikian juga dari sisi belanja daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten membelanjakan kurang lebih 60% dari total belanjanya untuk belanja pegawai setiap tahunnya. Proporsi belanja pegawai ini terus meningkat, sehingga pada tahun 2008 porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah mencapai 63,97%. Hal ini tentu saja kurang mendukung pembangunan daerah Kabupaten Klaten, karena belanja publik untuk pembangunan hanya mendapat porsi kurang dari 40%.

5.1.1.2. Faktor-faktor Eksternal

Nilai rata-rata (*benchmark*) untuk faktor eksternal adalah 6,44. Faktor-faktor yang mendapatkan nilai rata-rata di atas nilai *benchmark* akan dikelompokkan menjadi kesempatan (*Opportunity*), sementara yang nilai rata-ratanya di bawah *benchmark* dikelompokkan menjadi ancaman (*Threat*).

Tabel 5.6 Ringkasan Pembobotan Faktor-Faktor Eksternal

	Opportunity	Rata2
1	Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah	6,6
2	Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009	6,7
3	Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	6,95
6	Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional	6,6
8	Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten	6,45
9	Berbagai program pemerintah pusat	6,85
10	Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah	6,75
12	Kemajuan tehnologi yang sangat pesat	6,65
15	Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten	6,45
	Threat	Rata2
4	Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia	6,05
5	Ditandatangani kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China	5,4
7	Kondisi sosial politik di tingkat nasional	6,3
11	Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat	6,25
13	Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik sekitar Kabupaten Klaten	6,4
14	Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Klaten	6,15

Sumber: Hasil penilaian responden atas kuisisioner SWOT

a. Faktor peluang/kesempatan (*Opportunity*)

Berdasarkan rekapitulasi dari penilaian seluruh responden, faktor-faktor yang menjadi peluang dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. *Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,6. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk

mengembangkan segala potensi yang dimiliki, dan menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk semakin mengembangkan dirinya.

2. *Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,7. Undang-undang pajak sebelumnya No. 18 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dianggap merusak iklim investasi karena terlalu banyak obyek pajak yang ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah. Undang-undang pajak baru memberikan beberapa kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk menetapkan besaran pajak yang menjadi hak pemerintah daerah, meskipun tarif maksimal dan jenis-jenis pajaknya telah dibatasi. Misalnya, Pajak Air Tanah yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dengan adanya undang-undang baru, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan tersendiri, karena selain pemerintah kabupaten memiliki kewenangan lebih, Kabupaten Klaten memiliki beberapa sumber air yang tentu saja bisa menjadi obyek pajak bagi pemerintah daerah.
3. *Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,9. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 diatur tentang pemerintah dan pemerintah daerah yang harus menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menumbuhkan iklim usaha yang baik. Hal ini merupakan peluang besar bagi pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Klaten yang mulai bangkit untuk mendapatkan iklim yang kondusif bagi usaha yang mereka jalankan.
4. *Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,6. Krisis ekonomi global sudah menjadi isu utama yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Bagaimanapun, kondisi ini mempengaruhi perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun, keberhasilan Indonesia dalam melewati masa krisis ini, menjadikan kondisi perekonomian dunia ini menjadi peluang bagi Indonesia secara umum, dan Kabupaten Klaten secara khusus untuk berusaha meningkatkan

ekspor. Masalah sosial yang saat ini berkembang di dunia internasional adalah masalah kemiskinan dan pemanasan global. Kondisi ini juga merupakan cambuk bagi pemerintah daerah untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan dan menghentikan atau minimal mengurangi pemanasan global.

5. *Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,45. Kondisi politik di Kabupaten Klaten cenderung stabil, dan tidak ada gejolak yang berarti. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menarik minat investor, agar menanamkan modal ke Kabupaten Klaten, dengan jaminan bahwa kondisi politik di Kabupaten Klaten cenderung stabil dan kondusif. Kabupaten Klaten juga belum terbebas dari masalah-masalah sosial, masih banyak masyarakat miskin yang harus segera dientaskan dari permasalahan kebutuhan dasar mereka. Kondisi sosial ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk menunjukkan tanggung jawab konstitusi, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.
6. *Berbagai program pemerintah pusat*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,85. Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan berbagai program yang diharapkan bisa langsung menyentuh masyarakat luas, seperti jamkesmas dan BOS. Program-program pemerintah pusat ini, sekaligus bisa menjadi peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk memperluas pelayanan publik dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan, bagi masyarakat Kabupaten Klaten, mengingat tidak semua program atau agenda pembangunan daerah bisa diakomodir dengan biaya daerah.
7. *Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,75. Sampai saat ini, Kabupaten Klaten masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat. Sementara Kabupaten Klaten belum dapat mengoptimalkan kewenangan otonomi daerah, maka dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ini merupakan peluang besar dalam rangka melaksanakan pembangunan, sehingga harus dimanfaatkan sesuai dengan prioritas yang telah disusun.

8. *Kemajuan teknologi yang sangat pesat*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,65. Kemajuan teknologi merupakan faktor penting dalam pembangunan. Seperti dilansir oleh media Solo Pos tahun 2001, teknologi pengecoran logam di Kabupaten Klaten ketinggalan lebih dari 100 tahun apabila dibandingkan dengan Jepang. Dengan adanya kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Klaten diharapkan dapat menyesuaikan diri secara bertahap sehingga mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing dengan produk daerah atau negara lain.
9. *Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,45. Kabupaten Klaten saat ini sedang mengevaluasi keberlanjutan kerjasama dengan daerah-daerah se-eks Karesidenan Surakarta. Kerjasama yang bernama “Subosukawonosraten” tersebut dibentuk bersama dengan pemerintah daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Menurut responden, kerjasama ini merupakan peluang daerah, sehingga layak untuk dipertahankan, namun dengan tetap melakukan penyempurnaan-penyempurnaan program yang telah disepakati bersama.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

Berdasarkan rekapitulasi dari penilaian seluruh responden, faktor-faktor yang menjadi ancaman dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. *Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,05. Pada masa globalisasi, peran daerah menjadi sangat penting, dan menjadi pemeran utama dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan daerah untuk ikut berperan serta dalam perekonomian global. Apabila Kabupaten Klaten tidak dengan segera meningkatkan daya saingnya, maka Kabupaten Klaten tidak akan bisa bersaing di masa keterbukaan ekonomi seperti sekarang ini.

2. *Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China dan negara-negara ASEAN (ACFTA)*; faktor ini mendapat nilai rata-rata sebesar 5,4. Masuknya China dalam AFTA membawa kekhawatiran tersendiri bagi bangsa Indonesia. Meskipun tujuan AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi di antara negara-negara peserta AFTA dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, namun pada kenyataannya, kondisi ini justru meresahkan bagi perdagangan domestik, karena sejak diberlakukan tanggal 1 Januari 2010 semua produk China akan bebas masuk pasar ASEAN, termasuk Indonesia. Kekhawatiran ini berdasarkan pada fakta bahwa produk-produk China jauh lebih murah dengan kualitas yang mampu bersaing dengan produk lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sendiri saat ini, dalam Rencana Kerja Pemerintah-nya, menganggap daerahnya masih belum memiliki daya saing yang tinggi dan belum banyak produk Kabupaten Klaten yang mampu bersaing di pasar nasional ataupun internasional.
3. *Kondisi sosial politik di tingkat nasional*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,3. Kondisi sosial dan politik nasional yang cenderung bergejolak tentu saja menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Dengan bergejolaknya kondisi sosial politik nasional akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan investor pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. misalnya, dengan mencuatnya kasus Bank Century, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan, akibatnya masyarakat beramai-ramai menarik uangnya dari bank, sehingga mengakibatkan menurunnya investasi.
4. *Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,25. Presiden SBY dalam pidato pembukaan rakornas Pemberdayaan Aparatur Negara pada tanggal 15 November 2005 memberikan arahan untuk (1) melaksanakan reformasi birokrasi; (2) menegakkan dan menerapkan prinsip-

prinsip *good governance*; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (4) memberantas korupsi mulai dari diri sendiri. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind set* dan *culture set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Effendi, 2007). Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten, untuk juga mewujudkan *clean and good governance*. Menurut beberapa responden, *good governance* belum tercipta di Kabupaten Klaten.

5. *Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,4. Kabupaten Klaten berada diantara daerah-daerah yang telah maju, seperti Kota Surakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun hal tersebut juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Klaten, diantaranya karena banyaknya fasilitas nasional dan internasional yang telah disediakan di daerah-daerah tersebut, namun di sisi lain, kemajuan ini juga menjadi ancaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten harus bekerja jauh lebih keras untuk sekedar menyamai pencapaian daerah-daerah lain, padahal tentu saja daerah-daerah tersebut juga terus berusaha untuk semakin memajukan daerahnya. Ancaman lain karena kemajuan daerah lain adalah, karena posisi Kabupaten Klaten sangat dekat dengan daerah-daerah maju tersebut, maka dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa berinvestasi di daerah lain tersebut jauh lebih menguntungkan daripada berinvestasi di Kabupaten Klaten. Ancaman ini tidak hanya muncul dari pihak luar saja, tetapi juga muncul dari pihak intern Kabupaten Klaten. Banyaknya fasilitas yang lebih baik di daerah lain akan menarik masyarakat Kabupaten Klaten untuk lebih banyak menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Misalnya, dengan banyaknya pusat perbelanjaan yang lebih modern di Yogyakarta dan Surakarta, maka masyarakat Kabupaten Klaten lebih banyak berbelanja kebutuhan di daerah-

daerah lain, sehingga mematikan pasar lokal, dan perputaran uang akan lebih banyak di daerah lain tersebut.

6. *Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Klaten*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,15. Investasi swasta sangat penting dalam membantu pembangunan sebuah daerah. Ketika tidak semua barang publik disediakan oleh pemerintah, disinilah peran investasi swasta mulai dimainkan. Secara keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat, dan PAD-nya belum dapat menyumbang banyak untuk penerimaan daerah. Dengan segala ketergantungan tersebut, porsi belanja Kabupaten Klaten lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, dan porsi untuk belanja publik semakin menurun dengan semakin banyaknya rekrutmen PNS di Kabupaten Klaten. Dengan kondisi semacam ini, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten meningkatkan investasi swasta untuk menunjang pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2008, investasi swasta di Kabupaten Klaten mencapai Rp756.027 milyar dan mampu menyerap 8.262 tenaga kerja. Untuk dapat terus meningkatkan investasi swasta ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten harus melakukan reformasi birokrasi, salah satunya dengan menyederhanakan proses birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dengan segala potensi yang dimiliki, Kabupaten Klaten akan menjadi daerah tujuan investasi.

5.1.2 Pembobotan Internal Factor Analysis System (IFAS) dan External Factor Analysis System (EFAS)

Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan IFAS – EFAS dengan hasil seperti yang disajikan dalam tabel 5.7

Dari hasil pembobotan IFAS-EFAS elemen SWOT terlihat bahwa faktor kekuatan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi adalah Kabupaten Klaten sebagai

daerah pertanian, dengan nilai rata-rata sebesar 7,9. Hal ini, menurut penilaian responden, merupakan kekuatan utama bagi Kabupaten Klaten untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, meskipun sekarang ini sektor pertanian tidak memberikan kontribusi tertinggi dalam struktur perekonomian Kabupaten Klaten, karena berbagai masalah di bidang pertanian, namun apabila pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar pada sektor ini maka akan mengembalikan Kabupaten Klaten sebagai lumbung padi utama di Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar berprofesi di bidang pertanian dan bidang lain yang berhubungan. Namun, mengingat sektor pertanian merupakan sektor yang cukup lama merespon adanya perubahan, maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten harus lebih tanggap dan kreatif dalam mengemas sektor pertanian menjadi sektor yang lebih responsif terhadap perubahan, misalnya dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbasis pertanian.

Tabel 5.7 Penilaian Bobot IFAS – EFAS SWOT

		Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata- rata	Bobot (%) (b/Xsi)*bs	Urgensi (rating)	Bobot x rating
		STRENGTH	1	7,75	2,75	8,99
	3	7,55	2,55	8,33	3,55	0,30
	4	6,95	1,95	6,37	3,65	0,23
	5	7,9	2,9	9,48	3,65	0,35
	6	7	2	6,54	3,1	0,20
	7	7,35	2,35	7,68	3,2	0,25
	9	7	2	6,54	3,35	0,22
	12	6,9	1,9	6,21	3,15	0,20
		Total S (Xsi)	18,4			2,04

(Sambungan)

WEAKNESS		Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata- rata	Bobot (%) (b/Xsi)*bs	Urgensi (rating)	Bobot x rating
	2	6,7	1,7	5,56	3,35	0,19
	8	6,4	1,4	4,58	3,15	0,14
	10	6,3	1,3	4,25	3,05	0,13
	11	6,55	1,55	5,07	3	0,15
	13	6,6	1,6	5,23	3,2	0,17
	15	6,2	1,2	3,92	3,2	0,13
	16	6,4	1,4	4,58	3,2	0,15
	17	6,05	1,05	3,43	3,25	0,11
	18	6	1	3,27	3,45	0,11
	Total W (Xwi)	12,2			1,28	
	Xi = (Xsi + Xwi)		30,6			
	Bs= (Xsi/xi)*100%		60,13			
	Bw= (Xwi/Xi)*100%		39,87			

OPPORTUNITY		Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata- rata	Bobot (%) (b/Xoi)*bo	Urgensi (rating)	Bobot x rating
	1	6,6	1,6	7,42	3	0,22
	2	6,7	1,7	7,89	3	0,24
	3	6,95	1,95	9,05	3,15	0,29
	6	6,6	1,6	7,42	2,8	0,21
	8	6,45	1,45	6,73	3,2	0,22
	9	6,85	1,85	12,33	3,05	0,38
	10	6,75	1,75	8,12	3,2	0,26
	12	6,65	1,65	7,66	2,85	0,22
	15	6,45	1,45	6,73	3,05	0,21
	Total O (Xoi)	15			2,23	
THREAT		Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata- rata	Bobot (%) (b/Xti)*bt	Urgensi (rating)	Bobot x rating
	4	6,05	1,05	4,87	3,1	0,15
	5	5,4	0,4	1,86	2,85	0,05
	7	6,3	1,3	6,03	3	0,18
	11	6,25	1,25	5,80	3,1	0,18
	13	6,4	1,4	6,50	2,9	0,19
	14	6,15	1,15	5,34	3,45	0,18
	Total T (Xti)	6,55			0,94	
	Total (Xi)		21,55			
	Bo = (Xoi/Xi)*100		69,60			
	Bt = (Xti/Xi)*100		30,394			

Sumber: Pengolahan Hasil Kuisisioner SWOT

Faktor kelemahan yang mendapatkan nilai rata-rata terendah adalah PAD dan struktur APBD Kabupaten Klaten, dengan nilai rata-rata sebesar 6. Hal ini, menurut responden, merupakan kelemahan terbesar Kabupaten Klaten. Dari tahun 2005 sampai tahun 2008, sumbangan PAD terhadap total penerimaan daerah memiliki kecenderungan menurun. Begitu juga dengan struktur belanja daerah, yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan dengan keterbatasan dana yang dimiliki, masih banyak daerah di lingkungan Kabupaten Klaten yang harus dibangun.

Faktor peluang yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dengan nilai rata-rata sebesar 6,95. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan peraturan undang-undang dan kebijakan untuk menumbuhkan iklim usaha yang baik. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah, pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, peizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Hal ini memberikan peluang kepada usaha kecil dan menengah yang saat ini sedang mulai bertumbuh kembang di Kabupaten Klaten, dan memberikan kehidupan kembali kepada usaha kecil dan menengah yang sebelumnya mengalami mati suri.

Faktor ancaman yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah kesepakatan AFTA dimana China ikut dalam kesepakatan tersebut, dengan nilai rata-rata sebesar 5,4. Artinya, kesepakatan dengan negara-negara ASEAN, khususnya China yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010 ini merupakan ancaman terbesar bagi Kabupaten Klaten. Sejak tanggal tersebut, seluruh produk China akan dengan bebas memasuki pasar domestik, dengan harga yang jauh lebih murah, dan memberikan ancaman kepada produk-produk lokal.

5.1.3. Perumusan Strategi

Untuk mengetahui prioritas dan keterkaitan antar strategi berdasarkan pembobotan SWOT-nya, maka dilakukan interaksi kombinasi strategi internal-

eksternal. Perumusan strategi-strategi tersebut disusun berdasarkan faktor internal, strength dan weakness, serta faktor eksternal opportunity dan threat ke dalam Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT seperti pada tabel 5.8.

Tabel 5.8 Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>strength</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis Kabupaten Klaten. 2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. 3. Ketersediaan infrastruktur dasar 4. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian 5. Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten; 6. Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro; 7. Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten; 8. Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata; <p style="text-align: right;">Bobot 2,04</p>	<p>weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi topografi Kabupaten Klaten 2. Kapasitas dan kinerja kelembagaan. 3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah; 4. Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah; 5. Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah; 6. Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor 7. Penentuan skala prioritas pembangunan; 8. Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten; 9. Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD <p style="text-align: right;">Bobot 1,28</p>
<p>opportuniy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah ; 2. Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009; 3. Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; 4. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional; 5. Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten; 6. Berbagai program pemerintah pusat; 7. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah; 8. Kemajuan tehnologi yang sangat pesat; 9. Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten; 2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Klaten, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru; 2. Melakukan reformasi birokrasi dan melakukan promosi berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten dalam rangka menarik minat investor, karena pada dasarnya kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten cukup kondusif bagi investor; 3. Memeratakan hasil-hasil pembangunan, dan membuat prioritas pembangunan yang paling tepat, mengingat kondisi topografi Kabupaten Klaten yang kurang menguntungkan, dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi dan dukungan dari pemerintah pusat, baik berupa dana transfer maupun program-program nasional yang diharapkan dapat menyentuh masyarakat luas.

	<p>3. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);</p> <p>4. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten.</p>	
Bobot 2,23	BOBOT = 4,27	BOBOT = 3,51
<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia 2. Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China; 3. Kondisi sosial politik di tingkat nasional; 4. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat; 5. Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah lain, 6. Investasi swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dengan baik dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku ekonomi, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain serta sehingga mampu menghadapi globalisasi, pasar bebas, dan keterbukaan ekonomi; 2. Mempromosikan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Klaten, salah satunya potensi wisata dan potensi sumber daya alam untuk menarik investor ke Kabupaten Klaten; 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun industri kecil dan menengah yang mulai bangkit di Kabupaten Klaten, dalam rangka bersaing dengan produk-produk China yang dikawatirkan mulai menyerbu pasar Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, serta kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten serta melakukan reformasi birokrasi dalam rangka menyelaraskan diri dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat; 2. Meningkatkan PAD, memperbaiki struktur APBD, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan hasil-hasil pembangunan serta menetapkan prioritas pembangunan yang paling tepat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain, sehingga pada akhirnya Kabupaten Klaten menjadi daerah yang mampu bersaing di pasar global; 3. Melakukan sosialisasi berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Klaten.
Bobot 0,94	BOBOT = 2,98	BOBOT = 2,22

Sumber: Interaksi IFAS-EFAS

Secara ringkas hasil perumusan matriks IFAS – EFAS, berdasarkan strategi SO, ST, WO, dan WT, dilakukan pembobotan penilaian untuk menentukan skala

prioritasnya. Susunan strategi alternatif berdasarkan urutan prioritasnya yang diperoleh dari pembobotan matriks interaksi SWOT disajikan pada tabel xx.

Tabel 5.9 Pembobotan Hasil Kuisisioner SWOT

	S = 2,04	W = 1,28
O = 2,23	SO = 4,27	WO = 3,51
T = 0,94	ST = 2,98	WT = 2,22

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pembobotan kuisisioner, maka disusun prioritas strategi berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai yang paling rendah.

Tabel 5.10 Urutan Alternatif Strategi SWOT

Prioritas	Strategi	Bobot Nilai
I	<i>Strength – Opportunity (SO)</i>	4,27
II	<i>Weakness – Opportunity (WO)</i>	3,51
III	<i>Strength – Threat (ST)</i>	2,98
IV	<i>Weakness – Threat (WT)</i>	2,22

Sumber: Matriks Interaksi IFAS-EFAS

Hasil interaksi IFAS – EFAS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *Strength – Opportunity (SO)*, yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada. Kondisi ini menguntungkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten, karena dari sisi faktor internal, Kabupaten memiliki kekuatan

yang lebih besar daripada kelemahannya, sedangkan dari sisi faktor eksternal, peluang yang ada jauh lebih besar daripada ancaman dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11 Strategi Prioritas I: Strategi *Strength – Opportunity* (SO)

Strength	Opportuniy
<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis Kabupaten Klaten. 2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. 3. Ketersediaan infrastruktur dasar 4. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian 5. Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten; 6. Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro; 7. Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten; 8. Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah ; 2. Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009; 3. Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; 4. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional; 5. Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten; 6. Berbagai program pemerintah pusat; 7. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah; 8. Kemajuan tehnologi yang sangat pesat; 9. Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten.
Strategi SO (Strength – Opportunity)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten; 2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Klaten, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam 	

rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas;

3. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten.

Meskipun strategi SO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun untuk belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*). Penentuan prioritas kebijakan dari beberapa strategi kebijakan *Strength – Opportunity* (SO) yang dihasilkan melalui analisa SWOT pada penelitian ini dilakukan dengan *The Analytical Hierarchy Process* (AHP).

5.2. Perumusan Strategi kebijakan dengan AHP

5.2.1. Penyusunan Hirarki

Penyusunan hirarki merupakan bagian terpenting dari model AHP, karena akan menjadi dasar bagi para responden untuk memberi penilaian/pendapat secara lebih sederhana. Dengan menggunakan hirarki, diharapkan permasalahan yang kompleks akan menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami.

Dalam model AHP yang digunakan dalam penelitian ini, hirarki yang disusun terdiri dari 4 level, dengan level puncak sebagai fokus/goal dari hirarki, yaitu: “*Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten*”. Hirarki model AHP secara lengkap disajikan dalam diagram 5.1.

Pada level strategi, tidak hanya dimasukkan alternatif strategi kebijakan dari strategi terpilih, yaitu SO, tetapi dimasukkan tambahan 1 (satu) kebijakan dari strategi terbaik kedua (*second best*) yaitu strategi WO, dengan alternatif strateginya adalah

meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan. Hal ini dilakukan untuk melihat penilaian responden atas salah satu faktor intern yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, yaitu kapasitas dan kinerja kelembagaan. Penambahan strategi kebijakan ini dianggap perlu karena alternatif dari pilihan strategi SO hanya berfokus pada segala sesuatu yang ada di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, seperti sumber daya dan potensi pariwisata, tanpa adanya perhatian pada hal yang mendasar dari sebuah pemerintah secara umum, yaitu kapasitas dan kinerja kelembagaan. Selain itu, berdasarkan penilaian dalam analisis SWOT, pembobotan antara *strength* dan *weakness* tidak terlalu berbeda jauh, artinya nilai terendah dari faktor *strength* dan nilai tertinggi dari faktor *weakness* selisihnya tidak terlalu jauh.

Level 1 adalah **Skenario**, yang terbagi menjadi 3 (tiga) kemungkinan skenario yang mungkin terjadi, yaitu:

1. Skenario Optimis, merupakan skenario masa depan dimana lingkungan eksternal makro sangat mendukung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Klaten, atau kondisi masa depan lebih baik dari kondisi pada masa sekarang sehingga mendukung tercapainya sasaran yang diharapkan;
2. Skenario Status Quo, merupakan skenario masa depan, dimana kondisi lingkungan eksternal makro tetap sama dengan kondisi saat sekarang (hampir tidak ada perubahan);
3. Skenario Pesimis, merupakan skenario masa depan dimana kondisi lingkungan eksternal makro lebih buruk dibandingkan kondisi pada saat ini.

Level 2 adalah **Sasaran**, yang terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai, yaitu:

1. Sasaran mengurangi kemiskinan dan pengangguran, adalah suatu sasaran yang bermaksud untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih merupakan masalah utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
2. Sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adalah suatu sasaran yang bermaksud untuk menciptakan upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini dilihat dari PDRB dan PDRB per kapita, karena

diantara kabupaten-kabupaten sekitarnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten cenderung lambat;

3. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, adalah suatu sasaran yang bermaksud untuk menciptakan upaya yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Klaten.

Level 3 adalah **Alternatif** strategi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang diperoleh melalui analisis SWOT, yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber daya----- (Alternatif 1)

Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten;

2. Memperkuat ekonomi mikro----- (Alternatif 2)

Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas;

3. Mengembangkan potensi pariwisata----- (Alternatif 3)

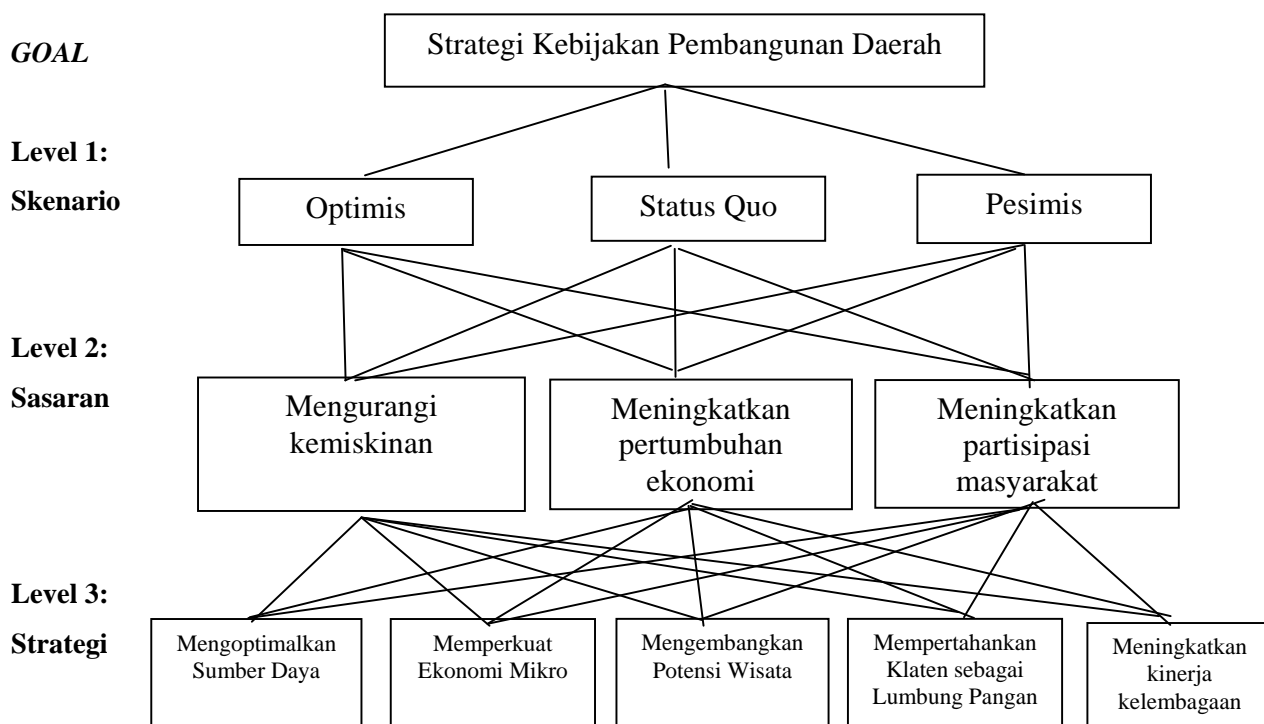
Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4. **Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai lumbung pangan-----(Alternatif 4)**

Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten;

5. **Meningkatkan kinerja kelembagaan----- (Alternatif 5)**

Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru.



Gambar 5.1 Hirarki Model AHP

Sumber: Hasil Analisis SWOT

5.2.1. Penilaian Responden

Berdasarkan pembobotan yang telah diberikan sebelumnya, kemudian dilakukan pengolahan data, sehingga dihasilkan nilai konsensus seperti yang dapat dijelaskan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12 Hasil Penghitungan atas Penilaian Responden

	Deskripsi	Responden							Bobot
		1	2	3	4	5	6	7	
Skenario									
	Optimis	0,625	0,649	0,696	0,637	0,637	0,731	0,192	0,6385
	Status Quo	0,238	0,279	0,229	0,258	0,258	0,188	0,634	0,2618
	Pesimis	0,136	0,072	0,075	0,105	0,105	0,081	0,174	0,0994
	<i>IR</i>	0,02	0,06	0,07	0,04	0,04	0,06	0,01	
Sasaran	Optimis								
	Mengurangi Kemiskinan	0,508	0,279	0,135	0,258	0,281	0,169	0,157	0,2783
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	0,113	0,649	0,584	0,637	0,135	0,387	0,594	0,4621
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0,379	0,072	0,281	0,105	0,584	0,443	0,249	0,2595
	<i>IR</i>	0,16	0,06	0,13	0,04	0,13	0,02	0,05	
	Status Quo								
	Mengurangi Kemiskinan	0,238	0,731	0,258	0,637	0,683	0,143	0,126	0,4439
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	0,136	0,081	0,637	0,258	0,117	0,571	0,416	0,2941
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0,625	0,188	0,105	0,105	0,2	0,286	0,458	0,2618
	<i>IR</i>	0,02	0,06	0,04	0,04	0,02	0	0,01	
	Pesimis								
	Mengurangi Kemiskinan	0,226	0,649	0,258	0,258	0,648	0,122	0,126	0,3448
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	0,101	0,072	0,637	0,105	0,23	0,648	0,416	0,2699
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0,674	0,279	0,105	0,637	0,122	0,23	0,458	0,3855
	<i>IR</i>	0,08	0,06	0,04	0,04	0,003	0,003	0,01	
Strategi	Optimis								
	Mengurangi Kemiskinan								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,235	0,31	0,226	0,447	0,162	0,193	0,215	0,2806
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,101	0,35	0,297	0,183	0,253	0,106	0,431	0,2322
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,213	0,212	0,099	0,075	0,038	0,112	0,088	0,1353

(Sambungan)

	Deskripsi	1	2	3	4	5	6	7	Bobot
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,051	0,085	0,189	0,255	0,452	0,049	0,11	0,1605
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,4	0,043	0,189	0,04	0,095	0,54	0,155	0,1914
	<i>IR</i>	<i>0,17</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	
	Optimis								
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,225	0,273	0,175	0,195	0,161	0,154	0,149	0,2048
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,165	0,457	0,401	0,384	0,215	0,238	0,519	0,3384
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,066	0,149	0,099	0,292	0,045	0,098	0,116	0,1373
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,083	0,046	0,104	0,048	0,513	0,051	0,101	0,1054
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,461	0,075	0,222	0,082	0,066	0,46	0,116	0,2147
	<i>IR</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>	<i>0,05</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>	<i>0,01</i>	
	Optimis								
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,386	0,082	0,214	0,233	0,243	0,128	0,143	0,2184
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,2	0,107	0,414	0,07	0,506	0,145	0,429	0,2274
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,063	0,107	0,089	0,436	0,038	0,108	0,143	0,1564
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,067	0,168	0,172	0,149	0,087	0,067	0,143	0,1292
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,285	0,536	0,111	0,111	0,126	0,551	0,143	0,2685
	<i>IR</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,06</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>	<i>0,04</i>	<i>0</i>	
	Status Quo								
	Mengurangi Kemiskinan								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,288	0,334	0,226	0,447	0,162	0,193	0,215	0,2960
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,093	0,289	0,297	0,183	0,458	0,106	0,431	0,2348
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,117	0,093	0,099	0,075	0,041	0,112	0,088	0,0926
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,059	0,24	0,189	0,255	0,256	0,049	0,11	0,1774
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,444	0,044	0,189	0,04	0,083	0,54	0,155	0,1994
	<i>IR</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	
	Status Quo								
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,272	0,27	0,189	0,201	0,163	0,17	0,166	0,2197
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,057	0,328	0,346	0,402	0,258	0,156	0,425	0,2767
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,07	0,263	0,115	0,248	0,048	0,139	0,142	0,1598
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,13	0,098	0,12	0,058	0,449	0,064	0,125	0,1272

(Sambungan)

	Deskripsi	1	2	3	4	5	6	7	Bobot
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,47	0,041	0,23	0,091	0,082	0,47	0,142	0,2162
	<i>IR</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>	<i>0,08</i>	<i>0,05</i>	<i>0,01</i>	
	Status Quo								
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,24	0,082	0,216	0,269	0,14	0,128	0,143	0,1886
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,045	0,107	0,411	0,066	0,511	0,145	0,429	0,1954
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,071	0,107	0,072	0,429	0,04	0,108	0,143	0,1534
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,136	0,168	0,164	0,154	0,235	0,067	0,143	0,1543
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,507	0,536	0,137	0,082	0,074	0,551	0,143	0,3081
	<i>IR</i>	<i>0,05</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	<i>0</i>	
	Pesimis								
	Mengurangi Kemiskinan								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,338	0,367	0,226	0,447	0,192	0,193	0,215	0,3150
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,068	0,293	0,297	0,183	0,286	0,106	0,431	0,2168
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,158	0,086	0,099	0,075	0,037	0,112	0,088	0,0990
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,04	0,217	0,189	0,255	0,398	0,049	0,11	0,1804
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,396	0,038	0,189	0,04	0,087	0,54	0,155	0,1890
	<i>IR</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	
	Pesimis								
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,291	0,25	0,189	0,156	0,118	0,17	0,166	0,2069
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,044	0,222	0,346	0,414	0,51	0,156	0,425	0,2755
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,079	0,334	0,115	0,286	0,042	0,139	0,142	0,1830
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,137	0,148	0,12	0,052	0,261	0,064	0,125	0,1224
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,45	0,044	0,23	0,091	0,07	0,47	0,142	0,2119
	<i>IR</i>	<i>0,09</i>	<i>0,07</i>	<i>0,08</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	<i>0,05</i>	<i>0,01</i>	
	Pesimis								
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,302	0,082	0,223	0,251	0,118	0,138	0,143	0,1978
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,063	0,107	0,389	0,074	0,51	0,146	0,429	0,1962
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,078	0,107	0,072	0,43	0,042	0,106	0,143	0,1550
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,148	0,168	0,166	0,16	0,261	0,062	0,143	0,1600
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,409	0,536	0,15	0,085	0,07	0,549	0,143	0,2912
	<i>IR</i>	<i>0,06</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,05</i>	<i>0</i>	

(Sambungan)

	Deskripsi	1	2	3	4	5	6	7	Bobot
	Global Analysis								
	Overall Inconsistency	0,01							
	Optimis	0,625	0,649	0,696	0,637	0,637	0,731	0,192	0,6385
	Status Quo	0,238	0,279	0,229	0,258	0,258	0,188	0,634	0,2618
	Pesimis	0,136	0,072	0,075	0,105	0,105	0,081	0,174	0,0994
	Mengurangi Kemiskinan	0,405	0,432	0,172	0,356	0,423	0,160	0,132	0,3249
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	0,117	0,449	0,600	0,483	0,140	0,443	0,450	0,3945
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0,477	0,119	0,227	0,161	0,436	0,396	0,418	0,2803
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,2848	0,2736	0,1955	0,2929	0,1914	0,1526	0,1609	0,2433
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,1134	0,3498	0,3751	0,2637	0,4052	0,1667	0,4382	0,2837
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,1198	0,1446	0,0993	0,2344	0,0396	0,1107	0,1323	0,1369
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,0824	0,1169	0,1370	0,1395	0,2649	0,0590	0,1278	0,1262
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,3987	0,1152	0,1935	0,0699	0,0990	0,5101	0,1412	0,2098

Sumber: Hasil pengisian kuisioner oleh para responden (diolah dengan *software Expert Choice*)

Berdasarkan data-data dan perhitungan dari hasil penilaian responden atas kuisioner AHP tersebut, maka diperoleh hasil urutan prioritas berdasarkan nilai prioritas tertinggi ditampilkan pada tabel 5.13.

Tabel 5.13 Hasil Pengolahan AHP Dengan Skenario Optimis

Level	DEFINISI	BOBOT LOKAL
1	Skenario	
	1. Optimis	0,6385
	2. Status Quo	0,2618
	3. Pesimis	0,0994
2	Sasaran	
	Optimis	
	1. Mengurangi kemiskinan	0,3249
	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	0,3945

(Sambungan)

Level	DEFINISI	BOBOT LOKAL
	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat	0,2803
3	Alternatif Strategi	
	1. Memanfaatkan modal dasar (sumber daya) yang telah dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah dan berbagai undang-undang tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, serta undang-undang pajak dan retribusi yang baru dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan	0,2433
	2. Memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas	0,2837
	3. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,1369
	4. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten	0,1262
	5. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru	0,2098

Sumber: Pengolahan penilaian responden dengan menggunakan *Software Expert Choice*

Dari Tabel 5.13 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Klaten, skenario yang dianggap paling realistis adalah Skenario

OPTIMIS, dengan sasaran yang harus diprioritaskan adalah **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI**. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka urutan prioritas kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat digambarkan dalam tabel 5.14.

Tabel 5.14 Urutan Prioritas Strategi Kebijakan Dengan Skenario Optimis

Prioritas	Strategi Kebijakan	Bobot
I	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,2837
II	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,2433
III	Meningkatkan Kinerja Lembaga	0,2098
IV	Mengolah Potensi Wisata	0,1369
V	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,1262
	Total Bobot	0,9999

Sumber: Tabel 5.13

5.2.3. Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten

Pertumbuhan ekonomi, menurut hasil penilaian responden, merupakan sasaran yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa kondisi perekonomian makro Kabupaten Klaten jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan kondisi perekonomian di daerah-daerah sekitarnya. Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode AHP, untuk mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi, didapatkan prioritas strategi kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut;

- *Memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas-----***(Prioritas I)**

Industri kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah saat ini sedang tumbuh subur di lingkungan Kabupaten Klaten, mulai dari usaha mebel, konveksi, kuliner, maupun industri pengolahan berskala kecil. Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah pusat mencoba memberikan kepastian dan jaminan bagi para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di daerah, bahwa keberadaan dan kelangsungan usaha mereka akan difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing, baik dari sisi pendanaan maupun fasilitas fisik lainnya. Dengan memberikan dukungan penuh kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, maka perekonomian mikro akan lebih kuat dalam mendukung perekonomian daerah Kabupaten Klaten.

Secara lebih mendetail, proporsi usaha mikro adalah sebesar 40%, usaha kecil sebesar 27%, dan usaha menengah sebesar 33%. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 59% bergerak di sektor industri pengolahan, 17% di sektor pertanian, 11% di sektor perdagangan, dan sisanya bergerak di sektor jasa, pertambangan, dan transportasi (www.umkm-soloraya.com)

Bank Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Regional 2010 memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan mengalami peningkatan, khususnya pada triwulan kedua. Optimisme ini apabila digabungkan dengan optimisme yang dimiliki oleh pemerintah daerah, serta keuletan dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor ekonomi mikro, maka sangat dimungkinkan bagi Kabupaten Klaten untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan akan dapat memperbaiki prestasinya di wilayah eks karesidenan Surakarta. Apalagi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dinyatakan bahwa produk UMKM di Kabupaten Klaten ini berada dalam tahap berkembang dan matang, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan;

- *Memfaatkan modal dasar (sumber daya) yang telah dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah-----***(Prioritas II)**

Saat ini, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola keuangan daerah dan potensi daerah yang dimiliki. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dengan pendekatan yang paling sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Untuk itulah perlu dilakukan optimalisasi atas segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dapat mencapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri, yang salah satunya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Klaten memiliki sumber daya yang luar biasa, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, yang menurut para ahli belum dimanfaatkan secara optimal, akibatnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Klaten juga belum optimal. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten wajib memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya.

- *Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru-----***(Prioritas III)**

Terpilihnya strategi yang diambil dari faktor kelemahan ini sebagai prioritas ketiga dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa bagaimanapun dalam melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kinerja kelembagaan adalah faktor yang cukup penting. Ternyata hal ini tidak disadari sebelumnya oleh para responden, sehingga mendapatkan penilaian yang relatif kecil. Meskipun kinerja kelembagaan menjadi faktor kelemahan, dan bukan berada dalam strategi terpilih, namun pemerintah daerah wajib memperhatikan faktor internal dalam diri mereka, yaitu, kinerja mereka sendiri untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten.

Pemerintah daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga atau dinas-dinas daerah, memegang peranan yang cukup penting dalam merencanakan, melaksanakan, sekaligus mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dengan tugas berat ini, adalah mutlak bagi pemerintah untuk memiliki kinerja dan etos kerja yang baik. Oleh para responden, kinerja kelembagaan yang ada di Kabupaten Klaten dianggap masih kurang memuaskan sehingga perlu diadakan perbaikan-perbaikan. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan prioritas terbaik ketiga, apabila pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

- *Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-----***(Prioritas IV)**

Mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Klaten ternyata bukan merupakan strategi pembangunan utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten, meskipun Kabupaten Klaten memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Hal ini sangat dipahami karena memang belum ada kesiapan sarana dan prasarana di sektor pariwisata ini, sehingga apabila pengembangan sektor pariwisata dipaksakan untuk menjadi prioritas utama pembangunan daerah Kabupaten Klaten, maka akan membutuhkan dana APBD atau investasi swasta yang cukup besar. Dari sisi regional pun, Provinsi Jawa Tengah tampaknya belum siap menjadi daerah pariwisata meskipun memiliki potensi wisata yang luar biasa, karena belum memadainya sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang yang sangat penting. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana salah satu program provinsi, yaitu Visit Jawa Tengah 2011 harus diundur sampai tahun 2013 sambil menunggu sempurnanya sarana dan prasarana di sektor pariwisata.

- *Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten-----***(Prioritas V)**

Mengembalikan atau mempertahankan posisi Kabupaten Klaten sebagai daerah lumbung pangan, saat ini bukan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Meskipun Kabupaten Klaten dinilai memiliki potensi untuk menjadi daerah agropolitan, namun ternyata akan lebih efisien bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten tidak memprioritaskan Kabupaten Klaten sebagai daerah lumbung pangan apabila ingin mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi. Daerah lumbung pangan yang identik dengan penanaman padi ataupun tanaman pangan lainnya membutuhkan waktu produksi yang relatif lama, dan banyak faktor eksternal yang mempengaruhi secara signifikan, namun terkadang tidak bisa kita kendalikan, seperti misalnya faktor iklim.

Para responden sendiri juga menganggap bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang cukup penting, hal ini ditunjukkan dengan penilaian responden kuisioner SWOT yang besar terhadap faktor Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian, bahkan faktor ini menjadi faktor kekuatan dengan nilai paling tinggi. Dan mengingat bahwa Kabupaten Klaten sendiri memiliki potensi yang cukup baik di bidang pertanian, didukung dengan dukungan dari berbagai pihak, maka bukan tidak mungkin bahwa Kabupaten Klaten mampu menghasilkan produk-produk pertanian sebagai produk unggulan yang juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten dan pada akhirnya mendorong Kabupaten Klaten menjadi daerah agropolitan.

5.2.4. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitifitas dipakai untuk melihat sensitifitas dari prioritas, apabila ada sedikit perubahan pada penilaian. Selain itu, analisis ini juga dapat dipakai untuk memprediksi keadaan, apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, misalnya

perubahan bobot atau ada perubahan urutan prioritas karena adanya perubahan kondisi perekonomian nasional, misalnya krisis ekonomi. Yang diharapkan adalah prioritas yang tidak terlalu berfluktuasi, apabila ada perubahan kecil dalam penilaian itu.

Untuk mencoba melakukan analisis sensitifitas, dalam penelitian ini akan membandingkan hasil pengolahan data, apabila seluruh responden menganggap skenario yang dianggap paling realistis adalah status quo atau pesimis.

- Skenario Status Quo

Apabila seluruh responden memilih skenario **STATUS QUO** sebagai skenario yang paling realistis, maka terjadi perubahan sasaran, dan sekaligus perubahan urutan prioritas kebijakannya, seperti yang dijelaskan pada tabel 5.15.

Tabel 5.15 Hasil Pengolahan AHP Dengan Skenario Status Quo

Level	DEFINISI	BOBOT
1	Skenario	
	1. Optimis	0,0910
	2. Status Quo	0,8180
	3. Pesimis	0,0910
2	Sasaran	
	Status Quo	
	1. Mengurangi kemiskinan	0,4198
	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	0,3072
	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat	0,2728
3	Alternatif Strategi	
	Sasaran Mengurangi Kemiskinan	
	Prioritas I : Mengoptimalkan sumber daya	0,2510
	Prioritas II : Memperkuat ekonomi mikro	0,2450

Sumber: Pengolahan penilaian responden dengan menggunakan *Software Expert Choice*

Dengan Skenario **STATUS QUO**, artinya kondisi perekonomian sama seperti pada saat ini, maka sasaran yang menjadi prioritas adalah **MENGURANGI KEMISKINAN**, dengan prioritas pertama yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah **MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA**. Dengan kondisi perekonomian seperti saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Masih banyak penduduk yang rentan pada masalah sosial dan berada di bawah garis kemiskinan dan belum banyak tersedia lapangan kerja yang memadai, yang mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pembangunan, apabila dikelola dengan baik. Sumber daya manusia di Kabupaten Klaten cukup melimpah, meskipun dengan kualitas yang masih sangat bervariasi. Sumber daya alam di Kabupaten Klaten juga mendukung pembangunan daerah, kekayaan alam ini bisa menghasilkan penerimaan daerah, misalnya sumber-sumber air yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, maupun kebutuhan pihak lain.

Dalam rangka mengurangi kemiskinan di Kabupaten Klaten, dalam skenario status quo, mengoptimalkan sumber daya menjadi prioritas kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, misalnya transfer dari pusat dan keuntungan posisi geografis, maka pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan yang paling tepat, sektor apa yang seharusnya dikembangkan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Klaten, dan pada akhirnya sedikit demi sedikit mampu mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Klaten.

- Skenario Pesimis

Apabila seluruh responden memilih skenario **PESIMIS** sebagai skenario yang paling realistis, maka terjadi perubahan sasaran, dan sekaligus perubahan urutan prioritas kebijakannya, seperti yang dijelaskan pada tabel 4.19.

Tabel 5.16 Hasil Pengolahan AHP Dengan Skenario Pesimis

Level	DEFINISI	BOBOT
1	Skenario	
	1. Optimis	0,0910
	2. Status Quo	0,0910
	3. Pesimis	0,8180
2	Sasaran	
	Pesimis	
	1. Mengurangi kemiskinan	0,3478
	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	0,2896
	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat	0,3628
3	Alternatif Strategi	
	Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	
	▪ Prioritas I: Mengoptimalkan sumber daya	0,2487
	▪ Prioritas II: Meningkatkan kinerja lembaga	0,2245

Sumber: Pengolahan penilaian responden dengan menggunakan *Software Expert Choice*

Dengan Skenario **PESIMIS**, yang artinya kondisi perekonomian lebih buruk dari pada kondisi saat ini, maka sasaran yang menjadi prioritas adalah **MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT**, dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah **MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA**. Dengan kondisi perekonomian yang buruk, maka partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat diharapkan semakin bisa berperan serta secara aktif mendukung pembangunan ditengah kondisi perekonomian yang mungkin kurang menguntungkan.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam pembangunan daerah, khususnya pada masa otonomi daerah seperti sekarang ini. Bentuk partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai peran aktif masyarakat untuk

ikut menjadi inisiator yang berfungsi menentukan isu-isu dalam pengambilan keputusan dan sebagai pemandu, yang berfungsi mengarahkan pengambilan kebijakan (Fagence, 1977). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat berarti terlibatnya masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah walaupun saat ini, sering muncul kekhawatiran pemerintah daerah karena tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat secara umum.

Ginanjari Kartasasmita dalam Zoebir (2008) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program-program pembangunan daerah dapat dilakukan melalui tiga cara:

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional;
- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbukanya akses akan membuat masyarakat semakin berdaya, seperti misalnya tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan;
- Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah, jangan sampai pihak yang lemah terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dan membela harus dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sempurna dan eksploitasi atas yang lemah.

Dengan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat membuat prioritas pembangunan dengan paling tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam kondisi perekonomian yang buruk,

pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang paling tepat, sehingga terhindar dari pemborosan keuangan daerah ataupun melakukan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat ini, maka berdasarkan penilaian para *expert*, prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

Sumber daya manusia di Kabupaten Klaten cukup berlimpah, dimana 75,69% nya merupakan penduduk usia produktif, hal ini merupakan salah satu modal dasar yang cukup baik bagi Kabupaten Klaten untuk melakukan pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan sumber daya manusia ini, antara lain dengan memberikan pendidikan, ketrampilan, dan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, maka diharapkan masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan.

Berdasarkan perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa hirarki yang dibuat dalam rangka menemukan urutan prioritas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, merupakan hirarki yang cukup tidak stabil. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam merencanakan pembangunan daerah, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya faktor intern pemerintah daerah, namun juga faktor ekstern yang tentu saja tidak bisa dikontrol, seperti misalnya kondisi nasional ataupun internasional. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan yang signifikan, maka akan terjadi perubahan pula pada sasaran pembangunan sekaligus urutan prioritas kebijakannya. Dengan memahami ketidakstabilan hirarki dalam penentuan prioritas kebijakan pembangunan daerah ini, maka pemerintah daerah dapat membuat antisipasi apabila terjadi sesuatu yang diluar perkiraan.